

KAUKUS
LINGKUNGAN HIDUP
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Menuju
Wakil Rakyat
Dengan Visi Pembangunan
Berkelanjutan



Informasi lebih lanjut:
ASISTEN DEPUTI URUSAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. DI. Panjaitan kav.24, Jakarta 13410
Tel: 021-85904919, Fax: 021-8580087
Email: asdep4_3@menlh.go.id
www.menlh.go.id

Mengapa “Kaukus Lingkungan”

Isu lingkungan hingga saat ini merupakan **isu marginal** dalam pengambilan keputusan pada tataran politik. Padahal dinamika upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan tidak dapat terlepas dari aspek politik. Aspek ini sangat mempengaruhi kesuksesan perjuangan menyelamatkan lingkungan.



Masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang baik *menyalurkan aspirasi lingkungan kepada DPRD* untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat yang mempunyai kekuatan legislasi akan lebih efektif sehingga DPRD perlu menginkorporasikan proporsional aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, untuk mempunyai kebijakan pro lingkungan, upaya ini sangat perlu didukung oleh para anggota DPRD yang memihak kebijakan lingkungan. Selanjutnya, anggota Dewan yang memiliki visi lingkungan dan konsisten memihak kepentingan pelestarian lingkungan dapat menterjemahkan tuntutan masyarakat secara operasional ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

Oleh sebab itu perlu adanya “Forum Anggota Dewan” yang anggotanya memiliki kepedulian terhadap isu LH namun keberadaan anggota-anggotanya tersebar di berbagai komisi atau fraksi.

PRASYARAT UNTUK TERMANIFESTASIKANNYA ANGGOTA DPRD YANG AKTIF MEMPERJUANGKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

- ✍ Sadar dan Paham Lingkungan;
- ✍ Peran *popularitas* menunjang “karir” dalam pemilihan anggota DPRD berikutnya;
- ✍ Insentif.

4

Tujuan

- o **Pengarusutamaan isu lingkungan hidup** dalam kebijakan di seluruh sektor pembangunan daerah. Isu lingkungan hidup perlu mendapat perhatian sejajar dengan isu ekonomi dan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- o Meningkatkan **kepedulian** lingkungan para anggota dewan terhadap masalah LH serta mewujudkan *good environmental governance*
- o Merumuskan **kebijakan lingkungan** daerah.
- o **Mengevaluasi kebijakan daerah** yang tidak ramah lingkungan
- o Menentukan **anggaran pembangunan daerah** yang berwawasan lingkungan
- o Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peran Kaukus Lingkungan

- o Melaksanakan pengarusutamaan isu lingkungan pada seluruh kebijakan pembangunan daerah serta sosialisasi kepada para anggota dewan lainnya dan anggota partainya.

- Disarikan berbagai sumber oleh Sinta Saptarina

- o Memasukan aspek lingkungan hidup ke dalam setiap pertimbangan perumusan kebijakan pada komisi/fraksi baik dalam anggaran lingkungan, evaluasi kelembagaan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan program lingkungan.
- o Merumuskan dan menepakati program environmental outlook daerah

Keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup

- o Fasilitasi Deklarasi Kaukus Lingkungan
- o Penyediaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Isu Lingkungan Hidup di tingkat global dan nasional
- o Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelibatan kebijakan lingkungan



Kelompok representatif yang bersentuhan langsung dengan kelestarian lingkungan seperti masyarakat nelayan, petani, pekerja dan pengusaha perlu mengambil inisiatif memberi “tekanan” (*pressure*) kepada para pengambil keputusan.

Akhirnya, masyarakat menilai bahwa anggota yang duduk di legislatif adalah mereka yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat (*green legislator*)

Partisipasi Publik dan Kebijakan Lingkungan

Kualitas lingkungan di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Hal ini disebabkan :

- o Tingginya potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan,*
- o Kepentingan jangka pendek dan panjang; serta*
- o pemahaman masalah lingkungan yang tidak mudah.*

Perusakan lingkungan ini disebabkan a.l. oleh maraknya pembalakan liar (illegal logging), pertambangan dan pertanian tidak berwawasan lingkungan sehingga menyebabkan bertambahnya lahan kritis menjadi: 21.969.430 ha (data tahun 2004). Pencemaran lingkungan dari sektor industri dan transportasi juga memberikan andil terhadap menurunnya kualitas udara, air dan tanah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek *sosial, ekonomi dan lingkungan hidup* harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak dalam masyarakat. Para pihak tersebut merupakan kelompok utama yang terdiri antara lain kelompok petani, nelayan, pekerja/buruh, masyarakat adat, perempuan, pemerintah daerah, legislatif, LSM, pengusaha, budayawan, dan cendikiawan. Peran seluruh kelompok masyarakat tersebut perlu diberdayakan agar dapat berperan secara aktif sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan akan dapat dicapai.

Otonomi daerah telah memberi ruang kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Hal ini berarti, daerah mendapat peluang untuk mengelola SDA bagi kemakmuran masyarakat lokal. Namun, seringkali otonomi daerah belum dimanfaatkan secara tepat oleh pemerintah daerah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keinginan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi membuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan cenderung masih meminggirkan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Sekilas mengenai Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH) Kabupaten Gianyar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar, Bali membangun Komitmen bersama dengan membentuk Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH) pada tanggal 11 Mei 2005. Forum komunikasi ini terbentuk melalui proses sosialisasi beberapa waktu sebelumnya antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan anggota DPRD Kab. Gianyar yang diperantarai oleh kelompok *Environmental Parliament Watch* Kab. Gianyar pimpinan DR. Ir. I Wayan Suarna.

Forum yang diketuai oleh Ida Bagus Minaka, SH, terdiri dari para anggota legislatif lintas komisi dan lintas fraksi yang diharapkan dapat merespons semakin meningkatnya degradasi lingkungan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Naskah deklarasi:

Om Awighnamastu Namu Siddham

Mencermati meningkatnya degradasi lingkungan di berbagai sektor kehidupan masyarakat kami anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gianyar berketetapan hati membangun komitmen bersama dalam lingkup lintas fraksi dan atau komisi memperjuangkan hak rakyat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai wahana dalam mewujudkan perjuangan lingkungan hidup, kami sepakat menjalin aliansi strategis dan menghimpun diri ke dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten Gianyar. Forum ini mempunyai komitmen mewujudkan pembangunan Bali berbasis lingkungan hidup

*Om Ksama Sampurna Ya Narnah
Dirghayurastu Tatastu Astu*